

**DAMPAK REVOLUSI HIJAU PADA MASA ORDE BARU DI KABUPATEN
GUNUNGGIDUL TAHUN 1971-1976**

JURNAL SKRIPSI



Oleh:

Nugraha Elya Patra

12406244021

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

DAMPAK REVOLUSI HIJAU PADA MASA ORDE BARU DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 1971-1976

Oleh :

Nugraha Elya Patra

12406244021

Gunungkidul merupakan daerah yang sering mengalami kekurangan pangan, untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah memberlakukan program revolusi hijau. Tujuan penelitian ini adalah; (1) mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul sebelum pelaksanaan revolusi hijau; (2) mengetahui program revolusi hijau yang dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul tahun 1971-1976; (3) mengetahui dampak pelaksanaan revolusi hijau yang dilaksanakan di kabupaten Gunungkidul tahun 1971-1976.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo, dengan tahapan (1) Pemilihan topik, (2) Heuristik (mengumpulkan sumber), (3) Kritik sumber, (4) Interpretasi, (5) Historiografi. Pemilihan topik merupakan tahap untuk menentukan judul penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu. Heuristik merupakan tahap mengumpulkan sumber baik primer maupun sekunder. Kritik sumber dilakukan untuk menguji keaslian sumber baik secara fisik maupun isi. Interpretasi merupakan tahap dimana sumber ditafsirkan dan dipahami. Historiografi merupakan tahap penyusunan seluruh penelitian berdasarkan kaidah penulisan historis.

Hasil penelitian ini menunjukkan; (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul terutama petani sangat bergantung pada kondisi geografisnya. Curah hujan yang sangat terbatas membuat para petani mengalami kesulitan dalam bercocok tanam; (2) Revolusi hijau merupakan salah satu program yang dilaksanakan pemerintah orde baru di bidang pertanian. Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan bibit padi unggul, melaksanakan bimbingan pada masyarakat, penyediaan pupuk anorganik, dan penyediaan pompa air. (3) Revolusi hijau telah memodernisasi aktivitas pertanian di Gunungkidul. Meskipun demikian, program ini tidak sepenuhnya berhasil. Revolusi Hijau justru lebih menguntungkan petani yang kaya daripada petani miskin. Selain itu, revolusi hijau ternyata belum mampu mencegah masyarakat terutama petani Gunungkidul dari bahaya kelaparan maupun penyakit selama masa paceklik.

Kata Kunci : Revolusi Hijau, Petani, Gunungkidul

ABSTRACT

IMPACTS OF THE GREEN REVOLUTION IN THE NEW ORDER ERA IN GUNUNGKIDUL REGENCY IN 1971-1976

Nugraha Elya Patra
12406244021

Gunungkidul was an area that often suffered from food shortages; to overcome this, the government imposed a green revolution program. The study aimed to investigate: (1) people's socioeconomic conditions in Gunungkidul before the green revolution, (2) the green revolution program implemented in Gunungkidul Regency in 1971-1976, and (3) impacts of the green revolution implemented in Gunungkidul Regency in 1971-1976.

This study used Kuntowijoyo's historical research method with the stages of: (1) topic selection, (2) heuristics (source collection), (3) source criticism, (4) interpretation, and (5) historiography. Topic selection was the stage of determining the title of the study based on certain considerations. Heuristics was the stage of collecting both primary and secondary sources. Source criticism was done to assess the authenticity of the sources both physically and substantially. Interpretation was the stage in which the sources were interpreted and understood. Historiography was the stage of arranging all research components based on the rules of historical writing.

The results of this study were as follows. (1) The socioeconomic conditions of people in Gunungkidul, especially the farmers, depended on the geographical conditions very much. Very limited rainfall made farmers have difficulty in farming. (2) The green revolution was one of the programs implemented by the government of the New Order in agriculture. The program was implemented by providing superior rice seedlings, carrying out guidance for people, and providing inorganic fertilizers and water pumps. (3) The green revolution modernized agricultural activities in Gunungkidul. Nevertheless, the program was not fully successful. The green revolution was more beneficial to rich farmers than poor farmers. In addition, the green revolution was not able to prevent people in Gunungkidul, especially farmers, from the dangers of hunger and diseases during the famine.

Keywords: *Green Revolution, Farmers, Gunungkidul*

A. Pendahuluan

Selama berkuasa di Indonesia, pemerintah Orde Baru memberlakukan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam bidang pertanian adalah Revolusi Hijau. Revolusi Hijau oleh banyak petani dikenal dengan program Bimbingan Massal (Bimas).¹ Revolusi Hijau yang digalakkan di Indonesia merupakan suatu program nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan. Fokus utama peningkatan tersebut terutama ditujukan pada tanaman padi. Dalam hal ini menjadi prioritas utama dalam program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I.

Agar tujuan swasembada tercapai pada akhir pelita I, maka dibentuklah organisasi Bimas pada tingkat nasional hingga tingkat kecamatan.² Bimas secara umum merupakan suatu sistem penyuluhan, yaitu penyuluhan kepada petani ke arah usaha pertanian yang lebih maju dan berkembang, sehingga para petani mampu meningkatkan usaha pertaniannya serta mampu menghasilkan swasembada panen yang berkualitas dan melimpah. Alasan diberlakukannya kebijakan tersebut adalah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan anggapan bahwa beras merupakan komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, dan sosial untuk ke depannya.

Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam terbatas dan bentuk wilayah yang berbukit-bukit. Kabupaten Gunungkidul sudah sejak lama daerah tersebut terkenal sebagai daerah kekurangan air dan memiliki tanah yang tandus. Mayoritas petani di Gunungkidul menggunakan atau memanfaatkan tanah tegalan yang hanya dapat mengandalkan air pada musim hujan. Hanya sebagian wilayah tanah pertanian yang dapat digunakan dengan pengairan tetap.

Penerapan Revolusi Hijau di Gunungkidul memiliki perbedaan dibandingkan dengan daerah lain. Krisis sumber mata air merupakan masalah utama yang ada di Gunungkidul. Namun hal tersebut justru menjadi alasan bagi pemerintah untuk memberlakukan program revolusi hijau di wilayah ini. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi petani di Gunungkidul. Penerapan Revolusi Hijau di Kabupaten Gunungkidul tidak serta merta berhasil dilakukan. Ada sejumlah hambatan yang terjadi selama pelaksanaan revolusi hijau di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, pelaksanaan revolusi hijau juga berdampak pada masyarakat luas. Tulisan ini akan mencoba membahas tentang pelaksanaan, hambatan, serta dampak pelaksanaan revolusi hijau di Kabupaten Gunungkidul.

B. Kajian Pustaka

Penulisan karya historis memerlukan kajian pustaka agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.³ Kajian pustaka juga digunakan untuk menjawab rumusan

¹ Loekman Soetrisno, *Pertanian Pada abad ke 21*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, hlm.11.

² Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 132.

masalah penelitian. Setiap rumusan masalah memiliki kajian pustaka tersendiri dan akan dibahas satu-persatu.

Rumusan pertama dalam penelitian ini akan membahas tentang kondisi sosial ekonomi Kabupaten Gunungkidul sebelum pelaksanaan revolusi hijau. Oleh karena itu untuk mengkaji tentang permasalahan tersebut maka sebagai perbandingan buku karya Fadjar Pratikto dengan judul *Gerakan Rakyat Kelaparan: Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Karya tulis ini tentu sangat membantu dalam memahami kondisi Gunungkidul pada dekade tersebut dan keadaan masyarakat pada umumnya di Gunungkidul pada saat menghadapi masa sulit.

Rumusan masalah yang kedua akan membahas tentang pelaksanaan revolusi hijau di Kabupaten Gunungkidul. Buku yang akan digunakan untuk menjelaskan hal tersebut adalah buku tulisan Mubyarto yang berjudul *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan* terbitan Sinar Harapan. Buku ini secara umum membahas kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan daerah pedesaan.

Rumusan masalah yang terakhir akan membahas tentang dampak revolusi hijau di Kabupaten Gunungkidul. Untuk membahas hal tersebut, buku yang akan digunakan adalah Sebagai perbandingan Buku karya Selo Soemardjan yang berjudul *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Dalam karya Selo Soemardjan menjelaskan bagaimana Perubahan Sosial di Yogyakarta dari jaman Penjajahan Kolonial Belanda sampai Kemerdekaan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo, dengan tahapan (1) Pemilihan topik, (2) Heuristik (mengumpulkan sumber), (3) Kritik sumber, (4) Interpretasi, (5) Historiografi. Pemilihan topik merupakan tahap untuk menentukan judul dengan pertimbangan tertentu. Heuristik merupakan tahap mengumpulkan sumber baik primer maupun sekunder untuk diolah pada tahap selanjutnya. Kritik sumber dilakukan untuk menguji keabsahan sumber secara fisik maupun isi. Interpretasi merupakan tahap menafsirkan dan memahami sumber yang telah didapatkan. Historiografi merupakan tahap penyusunan seluruh penelitian berdasarkan kaidah penulisan historis

D. Pembahasan

1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gunungkidul Sebelum Pelaksanaan Revolusi Hijau Tahun 1971-1976

a. Kondisi Geografis Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu dari 5 Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul terletak di bagian tenggara Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Gunungkidul mencapai 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴ Hal tersebut menjadikan Kabupaten Gunungkidul

³ Jurusan Pendidikan Sejarah UNY, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY*. 2013, hlm. 3.

sebagai Kabupaten terluas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Kabupaten Gunungkidul terletak pada 110° 21' sampai 110° 50' Bujur Timur dan 7° 46' sampai 8° 09' Lintang Selatan.

Secara topografis daerah Gunungkidul terbagi menjadi 3 zona⁵. Ketiga zona tersebut antara lain:

- 1) Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200 meter - 700 meter di atas permukaan laut. Kondisi pada zona ini berbentuk perbukitan. Di daerah ini terdapat sumber-sumber air tanah dengan kedalaman 6-12 meter dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi *latosol* dengan batuan induk *vulkanik* dan *sedimen taufan*. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam Zona Utara adalah, kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat hidup pada zona ini adalah pohon Jati, pohon Sonokeling, pohon Akasia, pohon Maoni, pohon Melinjo, pohon Cengkeh, buah-buahan, serta Padi Gogo dan Palawija.
- 2) Zona Tengah yang kadangkala disebut sebagai wilayah pengembangan Ledok Wonosari. Zona Tengah memiliki ketinggian 150-200 meter di atas permukaan air laut. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi *mediteran merah* dan *grumosol hitam* dengan bahan induk *batu kapur*. Jenis tanah tersebut membuat zona tengah masih dapat memiliki air sekalipun musim kemarau datang melanda. Di zona ini juga terdapat sungai di atas tanah, akan tetapi pada saat memasuki musim kemarau sungai menjadi kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60-120 meter dibawah permukaan tanah. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam Zona Utara adalah, kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah dan Semanu bagian utara. Tumbuhan yang dapat hidup di wilayah ini antara lain : Padi Gogo, Palawija, Tembakau, pohon Kapuk/Randu, pohon Melinjo, Tebu dan beberapa jenis sayuran.⁶
- 3) Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu. Wilayah ini memiliki ketinggian 100-300 meter diatas permukaan air laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit berbentuk seperti kerucut (*Conical limestone*) dan merupakan kawasan *karst*. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam Zona Selatan adalah kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu bagian selatan. Tumbuhan yang dapat tumbuh di wilayah ini antara lain : pohon Ketela, pohon Kelapa dan Jagung.⁷

⁴ Biro Statistik DIY, *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta: Bagian I*. Yogyakarta, 1973, hlm.19.

⁵ Fadjat Pratikto, *Gerakan Rakyat Kelaparan*. Yogyakarta: Media Presindo, 2000, hlm. 29.

⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

Keadaan alam wilayah Gunungkidul pada umumnya berupa dataran tinggi berbentuk bukit-bukit dan di kelilingi pohon-pohon yang tumbuh di perbukitan. Daerah Gunungkidul dikenal sebagai daerah yang kekurangan air dan memiliki tanah yang tandus sehingga daerah tersebut rawan kekurangan pangan. Akibatnya daerah-daerah yang mengalami kekeringan selingkali harus mengambil air dari wilayah yang memiliki cukup air.

Wilayah yang mengalami dampak kekeringan paling parah adalah daerah Selatan Kabupaten Gunungkidul. Untuk mengatasi bahaya kekeringan yang sering terjadi, masyarakat yang tinggal di kawasan Selatan Kabupaten Gunungkidul membuat danau buatan atau *telaga* untuk mengatasi kekurangan air pada saat musim kemarau. Bahkan pada saat musim kemarau tiba, warga harus berjalan beberapa kilometer untuk mendapatkan air. Kondisi inilah yang menyebabkan wilayah Kabupaten Gunungkidul terkenal sebagai wilayah yang sering mengalami bencana kekeringan.

Topografi wilayah Kabupaten Gunungkidul didominasi dengan daerah kawasan perbukitan karst. Wilayah bagian selatan didominasi oleh kawasan perbukitan karst yang banyak terdapat goa-goa alam dan juga sungai bawah tanah yang mengalir. Dengan kondisi tersebut menyebabkan kondisi lahan di kawasan selatan kurang subur yang mengakibatkan pertanian di kawasan tersebut kurang optimal. Kegiatan pertanian di Kabupaten Gunungkidul menggunakan sistem tadah hujan. Sistem tadah hujan sangat mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan pengairan dalam pertanian. Adanya dua musim tersebut bagi petani dapat membentuk pola keaktifannya terutama pada pemanfaatan tenaga kerja dalam bidang pertanian. Kedua musim itu setiap tahunnya tidak selalu mempunyai karakteristik yang sama, pada saat musim hujan ditentukan oleh intensitas curah hujan sedangkan pada saat musim kemarau cuaca panas mempengaruhi hasil pertanian dalam keberhasilan panen.

Sementara itu, curah hujan sebesar di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 1955 hingga 1973 adalah 1806 mm pertahun. Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan rata-rata hujan selama 19 tahun adalah 7 bulan merupakan bulan basah, 1 bulan merupakan bulan lembab dan 4 bulan merupakan bulan kering. Bulan kering terdapat pada bulan Juni sampai dengan bulan September, sedangkan bulan lembab terjadi pada bulan November sampai bulan Mei dan bulan basah terjadi pada bulan Desember sampai bulan April.⁸

b. Struktur Administrasi Pemerintahan

⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

⁸ Dinas Pertanian. *Laporan Dinas Pertanian tentang Curah Hujan dari Tahun 1955-1973*

Secara administratif daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 1970-an terbagi menjadi 13 Kecamatan dan 144 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah 1.485,36 km². Batas-batas administratif Kabupaten Gunungkidul antara lain sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman (Provinsi DIY); sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo (Provinsi Jawa Tengah); sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah); dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.⁹ Wonosari merupakan ibukota Kabupaten Gunungkidul. Daerah ini menjadi pusat kegiatan masyarakat dan merupakan kecamatan yang ramai serta padat penduduknya di Kabupaten Gunungkidul.

Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan sensus tahun 1971 sebanyak 620.085 jiwa. Jumlah tersebut terbagi dalam 122.173 rumah tangga. Kepadatan penduduknya mencapai 417 jiwa per kilometer persegi dengan rata-rata banyaknya anggota keluarga adalah 5 orang per kepala keluarga.¹⁰ Mayoritas masyarakat Gunungkidul mata pencahariannya adalah petani. Hal dikarenakan sebagian masyarakat memiliki pekarangan yang cukup luas selain untuk tempat tinggal sementara sebagian lahan yang kosong digunakan untuk lahan pertanian.

Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah yang kepadatan penduduknya paling rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun memiliki wilayah yang paling luas di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul justru memiliki kepadatan penduduk yang relatif sedikit bila dibandingkan dengan penduduk di kabupaten/kota lainnya. Hal ini menandakan penduduk pedesaan di wilayah Gunungkidul tidak mengalami kesulitan tanah yang ekstrem seperti halnya pedesaan di daerah-daerah lain di pulau Jawa.

Meskipun tidak memiliki masalah dalam kepemilikan tanah, namun tanah yang dimiliki pada umumnya kurang produktif. Kondisi geografis yang dihadapi berupa daerah yang berbukit-bukit dan tanah yang tandus serta kekurangan air di sebagian wilayah Gunungkidul. Daerah tersebut tentu saja sulit untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Daerah-daerah yang dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian oleh masyarakat kebanyakan adalah sawah yang banyak terdapat di Zona Ledok Wonosari.

c. Keadaan Sosial dan Ekonomi

⁹ Biro Statistik Kabupaten Gunungkidul. *Kabupaten Gunungkidul Tingkat II: Gunungkidul dalam Angka Tahun 1980*. Yogyakarta: Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Kantor Statistik, hlm.4.

¹⁰ Kantor Statistik Kabupaten Gunungkidul, *Penduduk Gunungkidul*. Hasil Sensus Penduduk 1961, 1971, dan 1980 Dilengkapi Hasil Sensus 1968. 1983, hlm. 2.

Pemukiman penduduk di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya membentuk pola bersebelahan atau berdekatan satu sama lain. Selain itu tidak jarang pula pemukiman penduduk membentuk suatu komunitas tersendiri yang diikat oleh tata cara adat istiadat desa. Rumah-rumah di pedesaan antara rumah satu dengan yang lainnya jaraknya saling berdekatan. Bahkan dalam satu pekarangan bisa terdapat lebih dari satu rumah tangga yang terdiri dari kumpulan beberapa rumah tangga yang menempati rumah panjang yang membentuk keluarga besar. Rumah tersebut terdiri beberapa keluarga yang masih memiliki hubungan yang dekat.¹¹ Ciri dari pemukiman yang rapat itu bila dilihat secara sosiologis akan lebih bersifat kolektif (kebersamaan), gotong-royong (gugur gunung), dan memiliki rasa kekeluargaan.

Bentuk rumah dan model gaya bentuk atap suatu rumah sering menjadi symbol atau penanda tingkat dan kedudukan sosial di dalam masyarakat desa.¹² Pada umumnya atap terbuat dari tanah liat hal ini tak jauh berbeda dengan atap di daerah Gunungkidul dan sebagian rumah penduduk menggunakan *gedhek* (anyaman dari bahan bambu) untuk alang-alang atap rumah dan dinding rumah. Sementara itu, tiang atau pondasi rumah menggunakan kayu jati dan kayu glugu. Lantai rumah biasanya berupa tanah, tegel dari batuan kapur, tegel dari batuan kali, atau berupa cor dari semen. Seorang warga desa dapat dikatakan sebagai orang cukup apabila mempunyai susunan rumah yang terdiri dari rumah *kampung* sebagai dapur, rumah *limasan atau lintring* sebagai ruang keluarga dan rumah *joglo atau pendopo* yang terletak pada bagian depan sebagai ruang tamu.

Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Gunungkidul khususnya petani dapat dilihat dari penggunaan atau pemanfaatan tanah oleh petani. Penggunaan tanah oleh petani tidak hanya terbatas satu macam tanah saja jika dilihat dari luas tanahnya. Tetapi terbagi menjadi 3 macam tanah yang dapat di manfaatkan oleh petani seperti tanah pekarangan, tanah tegalan, dan tanah lereng bukit pada pegunungan. Tanah pekarangan biasanya sering ditanami dengan pohon-pohon seperti pisang, melinjo, jeruk, pepaya, kelapa, dan tanaman lainnya yang dapat di jadikan konsumsi dan diperdagangkan. Kadang juga pekarangan dapat ditanami ubi-ubian, sayuran, dan juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Bagi petani yang tidak memiliki tanah tegalan, mereka juga memanfaatkan tanah pekarangan untuk menanam tanaman pangan seperti di tanah tegalan.

Kehidupan petani selalu tergantung pada kondisi alam. Perhitungan yang matang akan membawa mereka ke dalam perolehan hasil panen yang melimpah dan bagus. Banyak cara dalam bidang pertanian salah satunya menggunakan pola tumpangsari untuk mengurangi

¹¹ Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Falkultas Ekonomi Indonesia, 1984.hlm. 291.

¹² Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1972, hlm.332.

resiko kegagalan dalam pertanian. Meskipun demikian, pola pertanian yang baik belum tentu dapat meminimalisir kegagalan dalam bercocok tanam. Petani yang tidak mempunyai lahan yang cukup biasanya menggarap lahan kurang lebih dari 0,5 ha, dan petani yang menggarap lahan tersebut adalah petani Gurem (Petani Kecil).¹³ Sebagian besar petani, terutama petani gurem atau petani kecil berusaha meminimalisir gagal panen dari setiap proses produksi pertanian, hal ini dikarenakan petani tidak ingin terjadi gagal panen dalam proses produksi pertanian. Hal itu diakibatkan oleh pengairan tanaman yang tergantung pada musim penghujan, sehingga dalam pengelolaan lahan atau tanah tegalan harus mempertimbangkan pada musim hujan.

Gambaran kondisi geografis, serta sosial-ekonomi di Kabupaten Gunungkidul tersebut penting untuk dipahami sebelum membahas pelaksanaan revolusi hijau tahun 1971-1976. Kondisi Gunungkidul yang memiliki keterbatasan sumber air terutama di wilayah Selatan mengakibatkan banyak penduduk, yang mayoritas merupakan petani mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi inilah yang kemudian membuat pemerintah orde baru memiliki ide untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui program revolusi hijau.

2. Pelaksanaan Revolusi Hijau di Kabupaten Gunungkidul pada Masa Orde Baru Tahun 1971-1976

a. Kebijakan Revolusi Hijau pada Masa Orde Baru

Hancurnya perekonomian nasional pada akhir pemerintahan Soekarno membuat Soeharto memusatkan perhatiannya pada upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal ini menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.¹⁴ Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian utama dalam kebijakan ekonomi masa Orde Baru. Sebagai sebuah negara agraris, pemerintah memberikan prioritas kepada sektor pertanian supaya mampu menyokong perekonomian nasional.

Revolusi Hijau merupakan salah satu kebijakan pemerintah orde baru dalam bidang pertanian. Ide kebijakan ini berasal dari Presiden Soeharto. Revolusi Hijau merupakan bagian dari program pembangunan untuk mengupayakan pemulihan ekonomi negara setelah era Orde Lama berakhir. Selain itu, Revolusi Hijau juga dilatarbelakangi oleh masalah inflasi dalam negeri. Langkah awal yang dilakukan Soeharto adalah meningkatkan produksi pangan, berupa swasembada padi. Di saat yang bersamaan di berbagai belahan negara tengah muncul upaya pendirian gerakan pertanian yang dikenal dengan Revolusi Hijau untuk meningkatkan produksi pangan. Presiden Soeharto dengan bantuan para konsultan

¹³ Gagasan Perhepi, *Mengatasi Masalah Petani Gurem dan buruh Tani di Jawa*. Jakarta: Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, 1982, hlm. 1.

¹⁴ Ali Moertopo. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : CSIS, 1981, hlm. 48.

asing dan pakar di dalam negeri langsung mengikuti sepenuhnya metode yang dirancang melalui program Revolusi Hijau.¹⁵

Pemerintah membuat suatu kebijakan yang bertujuan membantu perkembangan pertanian rakyat. Tujuannya agar dapat memajukan kehidupan rakyat serta meningkatkan pendapatan negara. Cara yang ditempuh oleh pemerintah melalui pendekatan serta berusaha memperhatikan dan menganalisis kebutuhan petani. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan para penyuluh pertanian. Para penyuluh ini memiliki kewajiban untuk selalu dekat dengan rakyat. Selain itu, mereka juga melihat dan mempelajari masalah yang biasa dihadapi petani dan berusaha membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Revolusi hijau mulai dilaksanakan pada program Repelita I. Repelita I pada dasarnya dilakukan untuk mengatasi masalah produksi beras di Indonesia. Hal tersebut menjadi tujuan utama dalam rencana pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah¹⁶. Sebagai wujud nyata, pemerintah meluncurkan program Repelita I pada tahun 1969. Pokok utama program tersebut adalah dengan program swasembada pangan untuk meningkatkan produksi di bidang pertanian atau beras. Repelita I dimulai dengan cara pengenalan teknologi baru pada para petani. Keberadaan teknologi baru ini diharapkan dapat meningkatkan produksi beras dengan kualitas yang baik dan cepat. Teknologi baru ini berupa bibit-bibit unggul yang sangat responsif terhadap pemakaian pupuk. Kombinasi pemakaian bibit unggul serta pemakaian pupuk diharapkan dapat menghasilkan produksi beras yang berkualitas dan baik pada saat panen.

Sementara itu, politik pertanian yang ditekankan pada kebijakan peningkatan produksi beras dikelola dalam program nasional yang terkenal dengan nama Bimas. Pada program Bimas ini, Soeharto bahkan secara langsung mengawasi perkembangan pertanian sampai ke pelosok desa. Bimas dilaksanakan melalui program *Panca Usaha Tani* yaitu lima cara meningkatkan produksi panen diantaranya: 1) pemilihan bibit unggul; 2) pengairan atau irigasi; 3) pemupukan secara teratur; 4) penggunaan obat pembasmi hama; dan 5) sistem bercocok tanam dengan pola yang baik¹⁷. Kelima program inilah yang menjadi program utama dalam pelaksanaan revolusi hijau di tingkat nasional.

¹⁵ Andreas Maryoto, *Jejak Pangan: Sejarah, Silang Budaya dan Masa Depan*. Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 137.

¹⁶ Arifin Hutabarat, *Usaha Mengatasi Krisis Beras*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers, 1974, hlm. 43.

¹⁷ Mubyarto, *op.cit*, hlm. 73.

Bimas mulai dikenal pertama kali antara tahun 1969 dan 1970 pada saat pemerintah mulai merencanakan intensifikasi pada tanaman padi di sawah. Intensifikasi tersebut ditargetkan mencapai luas 1.000.000 ha dengan menerapkan sistem panca usaha tani. Salah satu dari lima usaha tani meningkatkan produksi padi ini adalah penggunaan bibit unggul. Karena pada tahun 1970 sampai 1971 adanya bibit ajaib PB 5 dan PB 8 mulia tersedia dalam jumlah yang sangat berlimpah, maka bibit unggul inilah yang menjadi simbol pengenalan sistem Bimas. Sebagaimana terjadi di negara-negara di Asia, bibit baru ini mampu meningkatkan produksi rata-rata 50% sehingga dianggap sebagai suatu kemajuan yang amat pesat. Inilah awal dari program Revolusi Hijau di Indonesia.

Program Revolusi Hijau yang masuk ke Indonesia pada tahun 1970 ternyata tidak sepenuhnya berpihak pada daerah yang mempunyai lahan yang subur. Artinya, tidak hanya daerah-daerah yang relatif subur seperti daerah persawahan tetapi juga berada di daerah-daerah lahan kering yang secara potensial kurang baik untuk bercocok tanam tanaman padi. Keadaan ini sesuai dengan intruksi Menteri Pertanian kepada Gubernur atau Kepala Daerah Provinsi yang berada di seluruh Indonesia¹⁸. Begitu juga di Daerah Gunungkidul yang sebagian besar tanahnya berupa lahan kering mendapat dampak dari Revolusi Hijau melalui program-program pembangunan yang masuk ke daerah itu. Terdorong oleh persoalan yang sangat rumit yaitu apabila pembangunan pertanian dilaksanakan dengan menekankan pada peningkatan produksi pertanian, maka kerusakan tanah yang semakin parah akibat erosi tidak dapat dihindarkan. Demikian juga, sebaliknya apabila pembangunan pertanian ditekankan pada penanggulangan erosi berarti akan mengundang kelaparan, maka pembangunan pertanian di daerah Gunungkidul dilakukan secara seimbang dan serasi.

b. Pelaksanaan Revolusi Hijau Pada Masa Orde Baru Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1971-1976

Sebagaimana daerah-daerah di pedesaan Jawa pada umumnya, masyarakat Gunungkidul sejak lama menggantungkan kehidupannya dengan bertani. Dengan kondisi wilayah yang kurang subur dan berkapur bukan merupakan hambatan bagi masyarakat untuk bercocok tanam demi melangsungkan kehidupannya. Meski masyarakat terkadang mengalami kegagalan akibat hasil panen yang diperoleh kurang baik akibat kurangnya ketersediaan air yang memenuhi dan tanah yang tandus, hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat saat musim panen tiba.

Kondisi petani semakin memburuk bila *mongso ketigo* tiba. *Mongso ketigo* atau tidak ada hujan terjadi antara bulan Juni sampai Agustus yang merupakan waktu pengolahan

¹⁸ Surat Menteri Pertanian Kepada Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi seluruh Indonesia, Prihal: Pemberitaan Usaha- usaha Pembangunan. Djakarta, 26 Mei 1971.

tanah dan mempersiapkan lahan pertanian. *Mongso labuh* atau awal hujan turun terjadi antara bulan September dan November dimana saat hujan turun pada awal bulan dan petani mulai menanam tanaman yang memerlukan banyak air seperti : padi gogo, ketela pohon, jagung, kedelai, kacang tanah, jewawut, dan lain-lain. Pada *mongso rendheng* atau musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember hingga pertengahan Maret biasanya petani mulai melakukan pemeliharaan tanaman, pemupukan, dan pemberantasan hama pada tanaman. Sedangkan pada saat memasuki *mongso mereng* atau musim kemarau terjadi antara bulan Maret hingga Mei petani mulai memanen hasil tanam mereka pada bulan sebelumnya seperti : jagung, padi gogo dan kacang tanah¹⁹. Metode bercocok tanam seperti itu merupakan cara petani untuk menggantungkan keyakinan terhadap perhitungan alam sekaligus untuk menghindari terjadinya gagal panen. Dalam sistem tersebut persoalan yang muncul adalah tidak maksimalnya hasil panen padi karena petani hanya memanen padi sekali dalam setahun.

Pemerintah Gunungkidul berusaha untuk mengatasi kekeringan, terutama di zona kritis (wilayah Selatan) dengan menerapkan kebijakan Reboisasi Lahan Kritis (RKLK). RKLK dilakukan dengan cara menanam berbagai tanaman seperti jati, mahoni, sengon, dan sebagainya.²⁰ Pelaksana program RKLK adalah Dinas Kehutanan. Selain untuk penghijauan, penanaman tanaman tersebut juga dilakukan sebagai hutan rakyat. Hasil-hasil tanaman tersebut dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan ekonomi warga.

Pada tahun 1971 pemerintah mulai memberlakukan revolusi hijau dengan menerapkan modernisasi pertanian²¹. Meski sebagian petani telah menggunakan teknologi modern, akan tetapi produktivitas lahan pertanian sangat terbatas. Penyebabnya adalah teknologi yang digunakan dalam program Revolusi Hijau sangat memerlukan air sehingga kurang efisien apabila dilakukan di lahan yang kurang produktif. Adapun air yang telah diusahakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul guna mengembangkan sumber air tanah melalui penerapan sumur pompa diesel yang selanjutnya dikenal dengan Proyek Pengembangan Air Tanah (P2AT) tidak dapat mencukupi kebutuhan air penduduk, sehingga penduduk masih dalam taraf pengupayaan dan hasil yang diperoleh hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga para petani.

¹⁹ Fadjar Pratikto, *Gerakan Rakyat Kelaparan. Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Media Presindo, 2000, hlm 41.

²⁰ Wawancara dengan Hidayat, tanggal 25 Januari 2017.

²¹ Fadjar Pratikto. *Op. Cit.*, hlm 54.

Pelaksanaan Revolusi Hijau di daerah Kabupaten Gunungkidul salah satunya dilakukan dengan cara menyediakan pupuk urea²². Kebutuhan terhadap pupuk urea ini untuk mensukseskan program Bimas di daerah Gunungkidul. Selain itu pemerintah Gunungkidul dalam menanggulangi musim *paceklik* (musim krisis pangan) menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pertanian Gunungkidul dan Camat serta jajaran perangkat desa untuk melakukan cara dalam mengatasi musim paceklik tersebut²³.

Sebagai salah satu implementasi Revolusi Hijau, pemerintah kemudian mengenalkan bibit padi unggul VOTW.²⁴ Bibit padi unggul VOTW dikenalkan kepada para petani karena dianggap mampu menghasilkan hasil panen yang lebih banyak daripada bibit padi biasa. Selain itu, bibit padi unggul VOTW juga memiliki masa panen yang lebih singkat bila dibandingkan dengan bibit padi biasa. Bibit padi unggul VOTW ini harus diimbangi dengan penggunaan pupuk anorganik. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi produktivitas dari bibit padi tersebut. Dengan menggunakan kombinasi bibit padi unggul VOTW dan pupuk anorganik ini, maka produksi beras diharapkan dapat meningkat.

Selain mampu memberikan hasil panen yang lebih banyak, bibit padi unggul VOTW juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah hasil beras dari bibit ini tidak sebaik hasil bibit biasa.²⁵ Nasi hasil bibit padi unggul VOTW ini lebih mudah basi dan lebih mudah berair daripada nasi hasil bibit biasa. Kelemahan ini sebenarnya cukup mengganggu para petani, namun karena ada kewajiban dari pemerintah Gunungkidul untuk menggunakan bibit padi unggul VOTW inilah, maka para petani tetap menggunakan bibit tersebut.

Selain dengan memberikan bibit unggul, pemerintah Gunungkidul juga berupaya agar masyarakatnya terhindar dari kelaparan saat memasuki musim kemarau atau *mareng*. Pemerintah Gunungkidul menginstruksikan untuk menanam tanaman yang dapat dipanen saat musim kemarau atau *musim mareng*. Masyarakat dianjurkan untuk menanam tanaman jenis *polo kependem* (jenis tanaman umbi yang ditanam dengan cara dipendam untuk mengatasi paceklik saat musim kemarau) seperti : *gembili, gembolo, suweg, garot, ganyong, benguk, dan jenis koro-koroan*.

²² Surat Bupati Daerah tingkat II Kab. Gunungkidul Kepada Kepala P.N. Pertanian Kesatuan Pemasaran D. I.U d/a Djl. A.M. Sangadji 19 di Yogyakarta, Prihal: Penyediaan Pupuk UREA untuk M.H. 1971/ 1972. Wonosari, 11 Oktober 1971.

²³ Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada Camat se-Kab. Gunungkidul dan Kepala Dinas Pertanian Kab. Gunungkidul, Prihal: Usaha-usaha Menanggulangi Paceklik Th. 1973-1974. Wonosari, 1 Januari 1973.

²⁴ Wawancara dengan Hidayat, tanggal 25 Januari 2017.

²⁵ *Ibid.*

Usaha lainya pemerintah Gunungkidul juga menganjurkan masyarakat untuk menanam jenis ketela pohon pada saat memasuki musim kemarau di Kabupaten Gunungkidul dengan cara *stek batang* atau memotong tangkai ketela pohon menjadi beberapa bagian dengan ukuran kurang lebih 4 sampai 5 cm untuk kemudian di tanam di atas tanah guna mengantisipasi datangnya musim kemarau.

Selain ketela pohon, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menjadikan jagung sebagai makanan alternatif. Untuk menerima bantuan berupa jagung tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membuat gedung penyedia pangan. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi pada saat memasuki musim paceklik²⁶. Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Gunungkidul juga melakukan berbagai usaha agar masyarakat terbebas dari kekurangan pangan.

Beberapa usaha pemerintah daerah Gunungkidul dalam meningkatkan produktivitas masyarakat sudah terlaksanakan. Meskipun demikian, program yang baru dan tumbuh berkembang belum mampu untuk menciptakan peluang-peluang yang berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan. Beberapa keberhasilan petani dalam meningkatkan produksi pangan tersebut dapat dikatakan merupakan kemajuan dalam sistem pertanian rakyat, yang berarti ada sebuah perbaikan ekonomi bagi kehidupan petani. Tetapi semua itu belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama pada saat musim paceklik²⁷. Di samping itu yang menjadi kendala dalam meningkatkan dalam produksi pangan adalah masalah pengairan yang masih sangat terbatas bahkan sulit pada musim kemarau tiba

3. Dampak Revolusi Hijau di Kabupaten Gunungkidul pada Masa Orde Baru tahun 1971-1976

a. Hambatan Pelaksanaan Revolusi Hijau di Kabupaten Gunungkidul pada Masa Orde Baru Tahun 1971-1976

Secara garis besar, hambatan pelaksanaan revolusi hijau yang terdapat di daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dibedakan menjadi dua permasalahan pokok. Permasalahan yang pertama berkaitan dengan masalah pokok wilayah atau yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya alam di Gunungkidul. Sementara itu, masalah yang kedua berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Gunungkidul atau yang berkaitan dengan sumber daya manusia.²⁸

²⁶ Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada S.P. Wakil Kepala Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, Prihal: Penyediaan Gudang Paceklik. Wonosari, 12 februari 1973.

²⁷ Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada S.P. Wakil Kepala Daerah D.I.Y di Yogyakarta, Prihal: Data-data Daerah Secara Rutin Kekurangan Pangan secara Serius dan Rencana Untuk Mengatasinya. Wonosari, 31 Januari 1973.

Masalah pokok wilayah di Kabupaten Gunungkidul ditandai dengan adanya lahan yang gundul diperbukitan yang dapat menimbulkan dampak bencana longsor serta mengakibatkan kurangnya debit air di sungai maupun sumur yang dibuat. Sebagai akibat dari topografi suatu wilayah maka hubungan interaksi antara Kabupaten yang masih berdekatan masih belum lancar dan juga masih terdapat beberapa desa yang masih sulit dijangkau dengan roda empat.

Lebih lanjut, hambatan dalam pelaksanaan Revolusi Hijau yang terjadi di Daerah Gunungkidul salah satunya diakibatkan kondisi geografi wilayah. Beberapa persoalan yang berkaitan dengan kondisi geografi antara lain: *pertama* kekurangan sumber air di daerah Selatan, *kedua* tanah yang tandus dan bagian bawah berupa batuan kapur, *ketiga* banyaknya petani yang mengandalkan sistem tadah hujan petani bagian wilayah Selatan, *keempat* kurangnya modal dalam pertanian, *kelima* masih banyak petani yang tidak memiliki lahan kurang dari 0,5 ha sehingga menyewa lahan dengan sistem bagi hasil kepada tuan tanah, struktur tanah yang berbeda-beda, *keenam* terbatasnya potensi sumber daya alam yang tersedia sehingga menghambat pembangunan ekonomi di wilayah Gunungkidul dan *ketujuh* adanya musim kemarau panjang yang mengakibatkan terjadinya krisis atau kelangkaan pangan sehingga membuat program revolusi hijau menjadi terhambat.

Selain itu, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program Revolusi Hijau di Gunungkidul adalah adanya penolakan dari sebagian petani. Masih ada petani yang menolak untuk terlibat dalam program tersebut. Akan tetapi hal itu tidak bertahan lama. Penyebabnya adalah penggunaan cara tradisional memakan waktu yang lama dan hasilnya panen sedikit. Adanya pupuk kimia dari program Revolusi Hijau meskipun hasilnya juga hampir sama dengan cara yang tradisional dari segi hasil panen akan tetapi pupuk kimia dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Dan itu juga merupakan kebutuhan dalam bertani, biasanya dengan pupuk organik padi yang tumbuh berdaun dua sedangkan menggunakan pupuk anorganik pada saat tanaman padi tumbuh berdaun tiga bahkan empat, meski jumlah hasil panen sama dengan penggunaan pupuk organik akan tetapi mempercepat dalam proses panen setahun dapat panen 2 kali.

Selain itu, distribusi bibit serta pupuk bersubsidi juga masih belum merata.²⁹ Penyebab ketidakmerataan tersebut antara lain pola distribusi yang masih bergantung kepada kelompok-kelompok petani. Bibit serta pupuk bersubsidi tersebut didominasi oleh petani yang tergabung dengan kelompok tani. Sementara petani yang tidak tergabung dalam kelompok

²⁸ Wawancara dengan Hidayat, tanggal 25 Januari 2017.

²⁹ Wawancara dengan Hidayat, tanggal 25 Januari 2017.

tani akan kesulitan mendapatkan bibit serta pupuk bersubsidi tersebut sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya menerima program dari pemerintah.

Keengganan sejumlah petani untuk bergabung dalam kelompok tani disebabkan karena kurangnya pendidikan. Hal tersebut merupakan kendala bagi masyarakat Gunungkidul dalam memahami pentingnya suatu organisasi kelompok tani. Hal tersebut diperparah dengan kurangnya informasi yang ada mengenai usaha dalam bidang industri rumah tangga, diakibatkan kondisi wilayah yang sulit dijangkau dan kurangnya orang yang terampil di setiap wilayah. Hambatan-hambatan tersebut, baik yang termasuk hambatan pokok wilayah maupun sosial ekonomi membuat program revolusi hijau belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan.

b. Dampak Pelaksanaan Revolusi Hijau di Kabupaten Gunungkidul pada Masa Orde Baru Tahun 1971-1976

Pelaksanaan revolusi hijau di Kabupaten Gunungkidul bagaimanapun telah mengubah beberapa aspek dalam kehidupan petani di Kabupaten Gunungkidul. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek produksi pertanian maupun aspek sosial-ekonomi. Meskipun demikian, harus diakui apabila program ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal dikarenakan berbagai hambatan yang telah dikemukakan diatas.

Revolusi hijau secara umum berusaha melakukan modernisasi terhadap cara produksi pertanian di Kabupaten Gunungkidul. Teknologi yang digunakan pemerintah berkaitan dengan penggunaan pupuk buatan, perbaikan sarana produksi, perbaikan alat-alat produksi, penggunaan obat pemberantas hama, pemilihan bibit-bibit unggul, dan metode bercocok tanam sesuai kondisi wilayah. Adanya teknologi pertanian melalui program pembangunan di desa-desa mampu mengubah kebiasaan petani dalam menggunakan alat-alat produksi dan sarana produksi lainnya yang lebih modern. Modernisasi ini membuat hasil-hasil produksi pertanian mengalami perubahan yang sangat baik.

Modernisasi pertanian ini secara umum mampu meningkatkan produksi beras di Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 1974 rata-rata produksi padi ladang mencapai 13,94 ton/ha dan meningkat menjadi 16,54 ton/ha.³⁰ Pencapaian positif juga dirasakan masyarakat di kecamatan Tepus. Sumur pompa yang dibuat di dekat pantai Baron membuat produksi padi sawah jenis unggul dapat meningkat. Peningkatan tersebut mencapai 60 kuintal/ha pada tahun 1973-1974.³¹ Selain meningkatkan hasil produksi pertanian, keberadaan sumur pompa

³⁰ Dinas Pertanian, *Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Bahan Makanan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1974-1979*.

³¹ Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada S.P. Wakil Kepala Daerah D.I.Y di Yogyakarta, Prihal: Pemanfaatan Sumur Pompa. Wonosari, 19 Desember 1974.

juga digunakan oleh masyarakat untuk keperluan air minum serta memandikan hewan-hewan ternak yang dimiliki warga. Angka-angka ini menunjukkan dengan jelas bahwa program revolusi hijau memberikan dampak positif bagi masyarakat Gunungkidul.

Revolusi Hijau di satu pihak telah berhasil meningkatkan produksi beras tetapi di lain pihak telah menyebabkan hasil keuntungan yang tidak merata. Ketidakmerataan tersebut menimbulkan dampak pada kehidupan sosial dan ekonomi pada masyarakat pedesaan yang memunculkan gejala kesenjangan sosial³². Kesejahteraan kepada petani yang kurang mampu dan buruh tani yang tidak memiliki sawah tetap berhenti atau dapat diperbaiki pada tingkat yang sangat lambat. Revolusi Hijau lebih menguntungkan petani yang kaya dari pada petani yang tidak memiliki lahan yang luas. Polarisasi ini mengakibatkan petani yang kaya akan semakin kaya sementara petani miskin akan semakin miskin.³³ Petani yang semakin miskin tentu saja akan mengalami berbagai persoalan terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Krisis pangan yang terjadi di Gunungkidul semakin memburuk apabila memasuki musim paceklik. Pada musim paceklik, harga kebutuhan pangan masyarakat akan semakin meningkat. Ironisnya, daya beli petani miskin masih terhitung sangat rendah. Dampaknya mudah ditebak, para petani tersebut tidak mampu memnuhi kebutuhannya sehari-hari. Untuk menanggulangi masalah tersebut, para petani yang masih memiliki aset seperti hewan ternak akan menjual hewan ternaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya saja, bagi petani yang tidak memiliki hewan ternak, kondisinya akan menjadi lebih sulit. Akibat dari semua ini adalah, tidak terelakkannya kelaparan yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan kemunduran dalam kehidupan masyarakat petani di Gunungkidul.³⁴

Paceklik yang terjadi diantara tahun 1973 hingga 1974 merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kelaparan di Gunungkidul. Paceklik tersebut diakibatkan oleh kemarau panjang yang disebabkan musim hujan tahun 1973 yang selesai lebih cepat dan musim hujan tahun 1974 yang tiba lebih lama.³⁵ Daerah-daerah yang mengalami rawan pangan

³² Mubyarto. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 150.

³³ Sartono Kartodirjo, *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 114.

³⁴ D.H. Penny dan Meneth Ginting, *Pekarangan, Petani, dan Kemiskinan: Suatu Studi Tentang Sifat dan Hakekat Masyarakat Tani di Sriharjo Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984. Hlm.12-13.

³⁵ Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada Camat se-Kabupaten Gunungkidul dan kepala Dinas Pertanian Gunungkidul di Gunungkidul, Prihal: Usaha-usaha Menanggulangi Paceklik

diantaranya adalah kecamatan Patuk, Nglipar, Ngawen, serta Semin. Daerah-daerah tersebut terletak di wilayah zona Batur Agung atau bagian Utara kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada dasarnya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi dampak-dampak dari paceklik yang terjadi di wilayahnya. Pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk menanam tanaman pengganti gaplek seperti *cantel* dan *telo rambat*.³⁶ Produksi gaplek pada masa ini memang menurun drastis yang biasanya mampu mencapai 2000 ton/tahun menjadi hanya 750 ton/tahun.³⁷ Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga berupaya melakukan penanggulangan terhadap krisis air yang terjadi di Semanu dan Tepus. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meminta bantuan dana untuk dropping air minum sebesar 1,5 juta rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk menyewa 3 truk tangki air. Program dropping air itu sendiri rencananya akan berlangsung selama 4 bulan.³⁸

Paceklik yang terjadi memaksa masyarakat memakan makanan alternatif seperti *gaplek*, *bulgur*, dan *mil* yang memiliki gizi rendah. Rendahnya gizi serta minimnya ketersediaan bahan makanan berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah penderita penyakit *hongeeroedem* (busung lapar). Angka penyakit *hongeeroedem* (busung lapar) di Kabupaten Gunungkidul memang mengalami peningkatan di masa sekitar paceklik pertengahan tahun 1970-an. Jumlah penderita *hongeeroedem* (busung lapar) mencapai 1.387 orang pada tahun 1973. Angka tersebut cenderung menurun sebelum kembali naik pada tahun 1976 yakni sejumlah 5.664 orang.³⁹ Besarnya jumlah penderita penyakit *hongeeroedem* (busung lapar) memberikan gambaran betapa buruknya dampak dari paceklik yang terjadi di kabupaten Gunungkidul pada pertengahan tahun 1970-an.

E. Kesimpulan

tahun 1973-1974. Wonosari, 1 Januari 1973.

³⁶ Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada Camat se-Kabupaten Gunungkidul dan kepala Dinas Pertanian Gunungkidul di Gunungkidul, Prihal: Usaha-usaha Menanggulangi Paceklik tahun 1973-1974. Wonosari, 1 Januari 1973.

³⁷ Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada S.P. Wakil Kepala Daerah D.I.Y di Yogyakarta, Prihal: Data-data Daerah Secara Rutin Kekurangan Pangan secara Serius dan Rencana Untuk Mengatasinya. Wonosari, 31 Januari 1973.

³⁸ Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada S.P. Wakil Kepala Daerah D.I.Y di Yogyakarta, Prihal: Data-data Daerah Secara Rutin Kekurangan Pangan secara Serius dan Rencana Untuk Mengatasinya. Wonosari, 31 Januari 1973.

³⁹ Dinas Kesehatan Rakyat Kabupaten Gunungkidul. *Penderita Honggeer Oedeem (HO) di Kabupaten Gunungkidul tahun 1972-1978*

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul terutama petani sangat bergantung pada kondisi geografisnya. Kondisi geografis Gunungkidul yang didominasi batuan karst membuat tanah yang ada di Gunungkidul relatif tandus. Selain itu, curah hujan yang sangat terbatas membuat para petani mengalami kesulitan dalam bercocok tanam. Kondisi inilah yang harus dihadapi petani di Gunungkidul sehingga hasil panen seringkali tidak optimal.
2. Revolusi hijau merupakan salah satu program yang dilaksanakan pemerintah orde baru di bidang pertanian. Ide kebijakan ini berasal dari Presiden Soeharto. Revolusi Hijau merupakan bagian dari program pembangunan untuk mengupayakan pemulihan ekonomi negara setelah era Orde Lama berakhir. Masyarakat luas mengenalnya dengan istilah Bimas. Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan bibit padi unggul, melaksanakan bimbingan pada masyarakat, penyediaan pupuk anorganik, dan penyediaan pompa air.
3. Revolusi hijau telah memodernisasi aktivitas pertanian di Gunungkidul. Meskipun demikian, program ini tidak sepenuhnya berhasil. Revolusi Hijau justru lebih menguntungkan petani yang kaya daripada petani miskin sehingga kesenjangan sosial semakin tajam di masyarakat. Selain itu, revolusi hijau ternyata belum mampu mencegah masyarakat terutama petani Gunungkidul dari bahaya kelaparan maupun penyakit selama masa paceklik. Pada masa paceklik, masyarakat masih sering mengalami kelaparan dan bahkan dalam beberapa kasus juga terjadi busung lapar.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

- [1] Kantor Statistik Kabupaten Gunungkidul, *Penduduk Gunungkidul*. Hasil Sensus Penduduk 1961, 1971, dan 1980 Dilengkapi Hasil Sensus 1968.
- [2] Surat Bupati Daerah tingkat II Kab. Gunungkidul Kepada Kepala P.N. Pertanian Kesatuan Pemasaran D. I.U d/a Djl. A.M. Sangadji 19 di Yogyakarta, Prihal: Penyediaan Pupuk UREA untuk M.H. 1971/ 1972. Wonosari, 11 Oktober 1971.
- [3] Surat Menteri Pertanian Kepada Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi seluruh Indonesia, Prihal: Pemberitaan Usaha- usaha Pembangunan. Djakarta.
- [4] Biro Statistik DIY, *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta: Bagian I*. Yogyakarta, 1973.
- [5] Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada Camat se-Kabupaten Gunungkidul dan kepala Dinas Pertanian Gunungkidul di Gunungkidul, Prihal: Usaha-usaha Menanggulangi Paceklik tahun 1973-1974. Wonosari, 1 Januari 1973.
- [6] Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada S.P. Wakil Kepala Daerah D.I.Y di Yogyakarta, Prihal: Data-data Daerah Secara Rutin Kekurangan Pangan secara Serius dan Rencana Untuk Mengatasinya. Wonosari, 31 Januari 1973.

- [7] Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada S.P. Wakil Kepala Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, Prihal: Penyediaan Gudang Paceklik. Wonosari, 12 Februari 1973.
- [8] Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul Kepada S.P. Wakil Kepala Daerah D.I.Y di Yogyakarta, Prihal: Pemanfaatan Sumur Pompa. Wonosari, 19 Desember 1974.
- [9] Dinas Pertanian. *Laporan Dinas Pertanian tentang Curah Hujan dari Tahun 1955-1973*
- [10] Dinas Kesehatan Rakyat Kabupaten Gunungkidul. *Penderita Honggeer Oedeem (HO) di Kabupaten Gunungkidul tahun 1972-1978*
- [11] Dinas Pertanian, *Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Bahan Makanan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1974-1979.*
- [12] Biro Statistik Kabupaten Gunungkidul. *Kabupaten Gunungkidul Tingkat II: Gunungkidul dalam Angka Tahun 1980.* Yogyakarta: Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Kantor Statistik.

Buku:

- [1] Ali Moertopo. (1981). *Strategi Pembangunan Nasional.* Jakarta : CSIS.
- [2] Andreas Maryoto. (2009). *Jejak Pangan: Sejarah, Silang Budaya dan Masa Depan.* Jakarta: Kompas.
- [3] Arifin Hutabarat. (1974). *Usaha Mengatasi Krisis Beras.* Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers.
- [4] D.H. Penny dan Meneth Ginting. (1984). *Pekarangan, Petani, dan Kemiskinan: Suatu Studi Tentang Sifat dan Hakekat Masyarakat Tani di Sriharjo Pedesaan Jawa.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [5] Fadjar Pratikto. (2000). *Gerakan Rakyat Kelaparan.* Yogyakarta: Media Presindo.
- [6] Gagasan Perhepi. (1982). *Mengatasi Masalah Petani Gurem dan buruh Tani di Jawa.* Jakarta: Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia.
- [7] Koentjaraningrat. (1972). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.* Jakarta: Djambatan.
- [8] _____. (1984). *Masyarakat Desa di Indonesia.* Jakarta: Lembaga Penerbit Falkultas Ekonomi Indonesia.
- [9] Loekman Soetrisno. (1988). *Pertanian Pada abad ke 21.* Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- [10] Mubyarto. (1984). *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan.* Jakarta: Sinar Harapan.
- [11] _____. (1983). *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan.* Jakarta: Sinar Harapan.
- [12] Sartono Kartodirdjo. (1984). *Ratu Adil.* Jakarta: Sinar Harapan.

Wawancara:

- [1] Wawancara dengan Hidayat, tanggal 25 Januari 2017.

Penguji Utama



Dr. Aman, M. Pd.

NIP. 19741015 200312 1 001

Yogyakarta, 07 Juli 2017

Menyetujui,

Pembimbing



Rr. Terry Irenewaty, M.Hum.

NIP. 19560428 198203 2 003